

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia adalah komponen yang sangat penting dalam upaya pembangunan ekonomi. Suatu negara yang memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dapat menggunakan sumber daya manusia sebagai cara untuk mengembangkan pembangunannya. Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi yang cukup besar, dan populasi yang padat seringkali diikuti dengan masalah ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan utama di Indonesia Menurut Prawira (2018) adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Tingkat pengangguran di Indonesia terus meningkat dikarenakan banyaknya penawaran tenaga kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan pekerjaan (Mankiw, 2006).

Setiap negara pasti mengharapkan tingkat pengangguran yang rendah. Namun dalam prakteknya, pengangguran tetap muncul meskipun kondisi perekonomian sedang baik. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan, masalah kesehatan, angka putus sekolah bertambah, meningkatnya kriminalitas, hingga kekacauan politik keamanan dan sosial. Pengangguran yang dibiarkan akan mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjangnya adalah menurunnya produk domestik bruto (PDB) dan pendapatan per kapita suatu negara. Berdasarkan data BPS (2024), kenaikan jumlah penduduk di Indonesia juga diikuti dengan kenaikan jumlah pengangguran, pada tahun 2014 jumlah pengangguran terbuka di Indonesia

sebesar 7,39 juta jiwa dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 7,86 juta jiwa. pada tahun 2014 tingkat pengangguran Indonesia mencapai 6,25 persen. tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya berkisar 5 hingga 6 persen dan pada tahun 2023 tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,32 persen.

Setiap pemerintahan dari suatu negara pasti menginginkan agar jumlah pengangguran di negaranya dapat ditekan seminimal mungkin. Bahkan jika memungkinkan, negara tersebut dapat mencapai penggunaan tenaga kerja secara penuh (full employment), yaitu kondisi pengangguran yang jumlahnya cukup sedikit pada kisaran 4% dari jumlah angkatan kerja. Indonesia termasuk negara yang menginginkan agar pengangguran dapat ditekan serendah mungkin (Hariyanto, 2020). Di Indonesia, pengangguran tetap menjadi tantangan utama, terutama di provinsi-provinsi dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Tabel 1.1
Data Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi Di Indonesia
Tahun 2022-2024

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)		
	Tahun		
	2022	2023	2024
Banten	8,09	7,52	7,02
Jawa Barat	8,31	7,44	6,91
Kep.Riau	8,23	6,8	6,94
Dki Jakarta	7,18	6,53	6,03
Indonesia	5,86	5,32	4,82

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut data dari tabel 1.1 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (2024), menunjukkan bahwa Provinsi Banten menduduki urutan ke-

1 provinsi yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak di Indonesia terhitung dari tahun 2023 hingga tahun 2024 kemudian disusul Provinsi Jawa Barat dan Kepulauan Riau. Provinsi Banten, sebagai salah satu provinsi yang berada di wilayah barat Pulau Jawa, memiliki potensi ekonomi yang signifikan dengan adanya berbagai industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Struktur perekonomian banten salah satunya ditopang oleh sektor industri pengolahan yang mana menjadi sektor ekonomi dengan sumbangan terbesar pada tahun 2023. Provinsi Banten telah menerapkan proses industrialisasi sebelum Banten memisahkan diri dengan Jawa Barat hingga saat ini. Dengan adanya industrialisasi ini, telah berhasil menempatkan lapangan usaha industri pengolahan sebagai sektor strategis dalam perekonomian Banten (Hidayat, 2022). Dimana sejak Banten berdiri, lapangan usaha industri pengolahan selalu mendominasi perekonomian Banten. Beberapa industri besar yang berkembang adalah PT. Krakatau Steel, PT. Cilegon Fabricator, PT. Dover Chemical, dan PT. Pelat Timah Nusantara Tbk. Namun, meskipun memiliki potensi ekonomi dari sektor industri yang besar, Banten masih menghadapi masalah pengangguran yang cukup serius. dimana pembangunan ekonomi yang diharapkan mengarah pada industrialisasi akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai kesempatan dalam penciptaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja ini nyatanya belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada (Citamaha, 2018). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Banten seringkali berada di atas rata-rata nasional. pada tahun 2023 tingkat pengangguran yang ada di Indonesia sebesar 5,32

persen dan tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Banten pada 2023 sebesar 7,52 persen.

Tabel 1.2
Pengangguran, Pertumbuhan Upah, rata rata lama sekolah,
Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Angkatan Kerja
Periode 5 Tahun (2016-2021)

tahun	tingkat pengangguran (persen)	upah minimum (rupiah)	pertumbuhan upah (persen)	pertumbuhan ekonomi (persen)	rata rata lama sekolah (tahun)	jumlah angkatan kerja (jiwa)	pertumbuhan angkatan kerja (persen)
2016	8,92	1.784.000		5,28	8,37	5.587.093	
2017	9,28	1.931.180	8	5,75	8,53	5.596.963	0,18
2018	8,47	2.099.385	9	5,77	8,62	5.845.978	4,45
2019	8,11	2.267.990	8	5,26	8,74	6.042.279	3,36
2020	10,64	2.460.996	9	-3,39	8,89	6.213.233	2,83
2021	8,98	2.460.996	0	4,49	8,93	6.260.654	0,76

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kenaikan jumlah penduduk yang dialami Indonesia mengakibatkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Sejalan dengan pandangan kaum klasik, pertumbuhan penduduk yang pesat, jika tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan penyerapan tenaga kerja yang memadai, dapat menyebabkan penurunan pendapatan nasional dan meningkatkan pengangguran. jika dikaitkan dengan data tabel 1.2, diketahui bahwa tingkat pertumbuhan angkatan kerja dengan tingkat pengangguran yang terjadi di Provinsi Banten, diketahui jika beberapa kali kenaikan pertumbuhan angkatan kerja juga diikuti dengan naiknya tingkat pengangguran di Provinsi Banten salah satu pada tahun 2017 dan 2020. meski tingkat pertumbuhan angkatan kerja Provinsi Banten cenderung berfluktuatif jika dilihat dari persentase pertumbuhannya, walaupun bersifat fluktuatif tetapi angkatan kerja di Provinsi Banten selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. pertumbuhan angkatan kerja yang dibarengi dengan kenaikan tingkat

pengangguran mengindikasikan bahwa dengan bertambahnya angkatan kerja tidak dibarengi dengan perluasan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran seiring dengan penambahan angkatan kerja (Adyaksa, 2020).

Dalam proses pembangunan ekonomi negara berkembang Djojohadikusumo dalam Alghofari (2011) mengungkapkan bahwa masalah pengangguran baik secara terbuka maupun terselubung menjadi kerap masalah utama. Berhasil atau tidaknya upaya untuk mengatasi masalah besar ini akan berdampak pada kestabilan sosial politik dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Karena pengangguran merupakan salah satu indikator kunci yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, angka pengangguran menjadi sangat penting dalam menilai keberhasilan suatu proses pembangunan ekonomi. Tingkat pengangguran yang rendah biasanya menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki akses terhadap pekerjaan, yang berarti mereka memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebaliknya, tingginya tingkat pengangguran dapat menjadi indikasi bahwa hasil dari pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan, karena berkurangnya daya beli masyarakat, menurunnya produktivitas, dan meningkatnya beban sosial dan fiskal pemerintah. Oleh karena itu, angka pengangguran sering digunakan sebagai salah satu tolok ukur utama untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ekonomi berhasil

dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya. beberapa faktor dianggap dapat mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain upah minimum, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Prawira (2018) menyatakan bahwa Upah dapat mempengaruhi tingkat pengangguran karena adanya kekakuan upah di pasar tenaga kerja, di mana upah tidak dapat menyesuaikan secara cepat atau tepat terhadap upah keseimbangan menjadi salah satu faktor utama yang memicu peningkatan pengangguran. Pendapat lain diungkapkan oleh Firdhania & Muslihatinningsih (2017), dalam penelitiannya yang menyatakan hubungan positif antara tingkat upah dengan tingkat pengangguran, hal ini dikarenakan peningkatan upah yang cukup stabil akan memberikan kemampuan untuk perusahaan, sektor ekonomi dan masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan aktivitas usahanya sehingga perusahaan dapat memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sekaligus pengurangan pengangguran. jika melihat data pada tabel 1.2, dapat diketahui jika besaran upah ditetapkan pemerintah di provinsi banten terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi tingkat pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. penelitian yang dilakukan oleh Darman (2013) yang meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran Indonesia menggunakan analisis hukum okun dalam

kurun waktu 1990 sampai dengan 2014, ditemukan hasil bahwa tingkat pengangguran di Indonesia tidak peka terhadap perubahan dalam output real dengan berbagai alasan seperti penerapan hukum okun ini ternyata cukup kontras jika diterapkan pada negara berkembang seperti Indonesia daripada negara maju.

Pendapat berbeda dinyatakan oleh Safitri (2021) dalam Penelitiannya, ia mengatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Jika pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang meningkat maka perusahaan-perusahaan akan memproduksi lebih banyak sehingga tingkat produksi akan naik begitu juga permintaan terhadap tenaga kerja yang juga akan meningkat. Hal ini tentu akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Hal ini tentunya sejalan dengan hukum okun yang menyatakan apabila terdapat kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan jumlah pengangguran.

Faktor selanjutnya yang dianggap berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan. menurut Todaro dalam Ramiayu (2016) tingkat pendidikan formal yang ditempuh pekerja sangat berpengaruh dalam pasar tenaga kerja. pendidikan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengetahuan. pendidikan sendiri memiliki peran dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran. Adanya program wajib belajar dua belas tahun diharapkan masyarakat golongan menengah ke bawah dapat mengenyam pendidikan dan serta dibina menjadi lebih baik dan nantinya

dapat bersaing di dunia kerja. dengan ini diharapkan program ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Apabila dilihat dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat provinsi Banten terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, hal tersebut menandakan semakin baiknya kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Sebuah Penelitian yang dilakukan Adyaksa (2020) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh tenaga kerja maka probabilitasnya menjadi pengangguran sangat kecil. hasil ini juga sejalan penelitian yang dilakukan oleh Prawira (2018), menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan antara tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka perlu dianalisis hubungan upah minimum, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Banten. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan peneliti, terdapat permasalahan yang terjadi yaitu Provinsi Banten telah menduduki urutan pertama sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Maka, dengan tinggi nya tingkat pengangguran di Provinsi Banten tersebut, penulis terdorong untuk menggali dan mengkaji masalah tersebut lebih dalam. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam tentang "faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten”. Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
2. Untuk Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
3. Untuk Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini fokus pada Provinsi Banten dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Variabel yang digunakan termasuk upah minimum, tingkat pendidikan dan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode

kuantitatif dengan analisis regresi berganda dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten dari tahun 2009 hingga 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

Untuk memberikan kontribusi kepada pembaca dalam memperluas pemahaman mereka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

b. Manfaat praktis

Memberikan panduan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran terbuka di Provinsi Banten, serta menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dalam penelitian mereka.